

Pengaruh Ukuran Pemerintah dan Kapasitas Fiskal Terhadap Diskresi Akrua

Nyayu Halima Thusa'dia, Maria, Yevi Dwitayanti

Politeknik Negeri Sriwijaya

nyayuhalima@gmail.com

ABSTRACT

This consider points to experimentally demonstrate what variables influence Gathering Tact of Nearby Government in South Sumatra Territory. The free factors in this think about are Government Measure and Financial Capacity . Whereas the subordinate variable in this ponder is Collection Caution. The test utilized within the ponder was the Money related Report of the Rule / City Territorial Government in South Sumatra Territory in 2018-2022. The information utilized in this consider were gotten from auxiliary information distributed by the Preeminent Review Office and the Central Bureau of Insights. The explanatory apparatus to be utilized is Numerous Straight Relapse examination utilizing the Eviews Adaptation 12 program. The comes about in this ponder show that government measure have a positive impact on collection tact, whereas financial capacity have no impact on collection tact.

Keywords: *Accrual Discretion, Government Size, Fiscal Capacity*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pembuktian secara empiris mengenai faktor yang bisa mempengaruhi Diskresi Akrua Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Variabel independen di dalam penelitian yang dipakai ini merupakan Ukuran Pemerintah dan Kapasitas Fiskal. Sementara variabel dependen di dalam penelitian yang dipakai ini merupakan Diskresi Akrua. Sampel yang dipakai di dalam penelitian merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. Data yang dipakai di dalam penelitian ini didapatkan dari data sekunder yang dipublikasikan pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang akan dipakai merupakan analisis Regresi Linier Berganda ketika memakai program Eviews Versi 12. Hasil di dalam penelitian ini memberi petunjuk jika ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap diskresi akrual, sementara kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap diskresi akrual.

Kata kunci: Diskresi Akrua, Ukuran Pemerintah, Kapasitas Fiskal

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mempunyai peranan penting ketika menyediakan layanan publik dan melindungi keuangan warga negara melalui penyediaan informasi keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah harus menerapkan praktik keuangan yang baik contohnya transparansi dan akuntabilitas (Kromen et al., 2023). Pemerintah daerah harus memberi penerapan akrual di dalam pelaporan keuangan sejak tahun 2015, contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis akrual adalah prinsip dari

akuntansi yang diterapkan untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah daerah dapat memakai kebijakan diskresi akrual untuk membantu mereka dalam menyusun laporan keuangannya. Informasi tersaji di laporan keuangan disusun dengan basis akrual lebih lengkap daripada basis kas. Tetapi, implikasi basis akrual dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah adanya waktu yang konstan bagi alokasi akrual ataupun manipulasi melalui diskresi akrual (Anessi-Pessina dan Sicilia, 2020; Cohen et al., 2019).

Diskresi akrual abnormal ini merupakan praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempengaruhi ataupun mengelola angka akrual yang dilaporkan LKPD. Diskresi akrual adalah suatu kewenangan dari pemerintahan daerah untuk memberi penerapan pada basis akrual di pengelolaan dan pelaporan keuangan. Arti diskresi akrual secara konseptual merupakan akrual yang nilainya ditentukan ada suatu kebijakan/diskresi pengelolaan. Tetapi terkadang memiliki sejumlah nilai diskresi akrual yang tidak sesuai yang sering disebut sebagai diskresi akrual abnormal. Diskresi akrual abnormal merupakan praktik yang bisa mengubah pelaporan keuangan pemerintah daerah yang kebebasan ketika melaporkan aset dan kewajiban, contohnya mengakui pendapatan dan pengeluaran dengan diskresi akrual (Cohen et al., 2019). Diskresi akrual abnormal dapat menyebabkan bias dalam informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kejadian yang tidak biasa dapat terjadi baik di sektor swasta maupun publik. Meskipun punya tujuan yang berbeda, contohnya di sektor keuangan, manipulasi akrual dipakai untuk memberi peningkatan laba, nilai perusahaan, dan mengurangi risiko kerugian. Tetapi, di sektor publik, tujuan utamanya merupakan memberi peningkatan pendapatan (R. Gamayuni et al., 2022). Hal ini terjadi karena kemampuan pemerintah untuk memakai pemantauan dan analisis non-objektif untuk menilai kinerja keuangan, contohnya manajemen aset ataupun liabilitas (Arcas & Martí, 2016).

Menurut Sari dan Mustanda (2019), Ukuran Pemerintah mengacu pada besar kecilnya suatu organisasi pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, karena peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya akan makin besar.

Martinez-Vazquez & Boex (1997) menemukan jika kapasitas suatu daerah untuk memberi peningkatan pendapatan dari sumber internal dalam rangka memenuhi kebutuhan warganya memiliki dampak negatif terhadap tekanan fiskal. Berdasarkan hasil penelitian itu, Penelitian ini mencoba buat mengkaji ulang variabel yang bisa mempengaruhi Diskresi akrual seperti ukuran pemerintah dan kapasitas fiskal di Provinsi Sumatera Selatan dengan memakai model yang dipakai pada penelitian terdahulu.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan *grand theory* yang bisa dipakai untuk menyatukan seluruh variabel di dalam penelitian. Implementasi teori keagenan (*agency theory*), Teori keagenan yang diterapkan di sektor publik sangatlah penting untuk mengkaji bermacam komitmen mengenai kebijakan yang mempunyai hubungan publik dengan masalah kontraktual, yakni informasi tidaklah simetris (Abdullah & Halim, 2006). terkait dengan susunan kontraktual diantara dua ataupun lebih individu, kelompok, ataupun organisasi pada organisasi publik (Halim & Abdullah, 2006), menarik untuk dianalisis lebih lanjut dengan memanfaatkan data keuangan dari laporan keuangan pemerintah daerah (Handayani et al., 2022). Arcas dan Martí (2016) memakai teori keagenan untuk menjelaskan hubungan diantara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan pemerintah daerah berperan sebagai agen. Hubungan antara teori keagenan dan diskresi akrual abnormal merupakan adanya konflik kepentingan diantara prinsipal dan agen di dalam suatu pengelolaan dana publik, sehingga menghasilkan persepsi yang baik terhadap kinerja keuangan yang melampaui ekspektasi di akhir tahun berujung pada peningkatan laba dengan mengurangi risiko keuangan (Pina et al. 2012).

Didasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memakai Teori Keagenan sebagai media analisis untuk menggeneralisasi konsep dasar suatu penelitian (variabel, indikator, dan lainnya) dan untuk memberi konfirmasi pada hasil penemuan penelitian. Teori ini punya tujuan menguji hubungan diantara variabel independen yaitu ukuran pemerintah, dan kapasitas fiskal; serta variabel dependen yaitu diskresi akrual pemerintah daerah.

Diskresi Akrual

Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan khusus tentang penerapan akuntansi basis akrual, peraturan itu ada di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 mengenai penerapan standar akuntansi basis akrual maupun peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah (basis akrual). Pemerintah harus mengalokasikan dana dengan cermat, baik dalam proses pengalokasian dana maupun dalam proses relokasi dana Diskresi ataupun kewenangan yang ada merupakan diskresi akrual.

Diskresi akrual adalah suatu kewenangan pemerintah daerah untuk menerapkan basis akrual pada pengelolaan dan pelaporan keuangan. Diskresi akrual dianggap mempunyai hubungan yang memiliki pola pada aspek-aspek lain di suatu organisasi (pemerintah daerah) contohnya total akrual, pendapatan, piutang, dan *plant property and equipment*. Tetapi, sering kali terdapat sejumlah besar perbedaan diskresi akrual yang tidak sesuai pada aspek-aspek yang disebutkan di atas. Hal ini dikenal sebagai diskresi akrual abnormal, dan sering dipakai untuk memberi petunjuk jika diskresi akrual sudah "dimanipulasi." Diskresi akrual abnormal dapat berdampak pada hasil keuangan, contohnya menurunkan estimasi dan mengganggu

transaksi bisnis, sehingga mengakibatkan kondisi keuangan yang tidak sesuai (R. R. Gamayuni, 2022). Basis akrual yang diterapkan oleh pemerintah daerah di bermacam bagian baik aset, pendapatan, beban, serta dapat mengetahui ukuran akrual yang diimplementasikan bagi pemerintah daerah ketika mengelola maupun melaporkan keuangan. Tingkat akrual yang disebutkan di atas merupakan tingkat kebijakan akrual yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan diskresi akrual. Selain itu, pemerintah daerah juga memperhatikan penerapan sistem akuntabilitas.

Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Diskresi Akrual

Ukuran pemerintah daerah merupakan suatu variabel dalam besar kecil pemerintahan suatu daerah yang diukur memakai total aset, jumlah penduduk, total pendapatan, maupun tingkatan produktivitas. Ukuran pemerintah daerah dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemda karena makin besar ukuran pemda, peluang kemudahan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, tetapi ukuran pemda yang kecil akan cenderung mengalami kesulitan. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Sari dan Mustanda (2019) yang menemukan jika ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang wajib dipertimbangkan untuk memberi peningkatan kinerja keuangan. Sementara pada penelitian Handayani et al., (2022) menemukan jika ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap diskresi akrual abnormal. Ukuran pemerintah daerah akan diprosikan dengan total aset yang ada. Dengan bertambahnya kekuasaan pemerintah, bertambah pula tingkat pemantauan dan penyelidikan terhadap manipulasi akrual, yang berpotensi mengurangi praktik diskresi akrual yang menyimpang.

H1: Ukuran pemerintah punya pengaruh terhadap Diskresi akrual pemerintah daerah di Provinsi Indonesia

Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Diskresi Akrual

Kapasitas fiskal yang besar mengurangi kemampuan untuk menyediakan layanan dan infrastruktur yang memadai di atas standar minimum. Kurangnya kemampuan ini berimplikasi pada pembahasan hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga menghasilkan kemungkinan hasil yang terbaik. Dua belah pihak akan lebih cermat ketika menganalisis tiap rencana yang dibiayai dengan belanja daerah.

H2: Kapasitas Fiskal punya pengaruh terhadap Diskresi Akrual pemerintah daerah di Provinsi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif. Informasi yang dipakai merupakan informasi pendukung berupa laporan anggaran pemerintahan daerah dari situs BPK RI Provinsi di Indonesia. Populasi dalam penelitian merupakan semua

Provinsi yang ada pada Indonesia yang memiliki jumlah 34 provinsi. Sementara sampel yang diteliti sebanyak 170 Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Data sampel didapatkan dengan memakai sampling jenuh. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2018-2022. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Proksi	Skala
Penelitian			
Diskresi Akrua	Dikresi akrua merupakan kebijakan dan kewenangan pemerintah dalam memakai laporan basis akrua (Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014)	$DAit = TAit - NDAit$	Rasio
Ukuran Pemerintah	Ukuran pemerintah merupakan Klasifikasi pemerintah daerah di Indonesia yang dibedakan didasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan ekonomi. Kabupaten dan kota dikategorikan didasarkan parameter- parameter itu untuk menentukan status serta kapasitas pemerintahan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014)	$UP = Ln\Delta Aset$	Rasio
Fiscal Distress	Fiscal distress merupakan tidak mempunya pemerintah daerah pada defisit ataupun naiknya surplus anggaran (Zeedan et al.,2014).	$FD = \frac{Kas\ Operasi\ Bersih}{Total\ Pendapatan}$	Rasio
Kapasitas Fiskal	Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan tiap daerah yang mencerminkan pada pendapatan daerah serta menerima pembiayaan daerah tertentu dikurangi pada pendapatan yang pemakaiannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu (+ belanja tertentu] Aturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022)	$KFD_{provinsi-i} = \frac{pendapatan - [pendapatan\ yang\ sudah\ ditentukan + belanja\ tertentu]}{pendapatan\ yang\ sudah\ ditentukan}$	Rasio
SiLPA	SiLPA merupakan Sisa Berlebih dari Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih diantara surplus/defisit anggaran pada pembiayaan netto.(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)	$SiLPA = \frac{Realisasi\ SiLPA}{Total\ Pendapatan}$	Rasio

Sumber: Data yang Diolah (2024)

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dipakai model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Didalam metode analisis regresi berganda pengujian yang dibuat pada bermacam pengujian yaitu:

1. Analisis Statistik Data yang diantaranya Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas.
2. Uji Regresi Berganda
3. Uji Hipotesis yang diantaranya Uji Statistik F dan Uji Statistik T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Data

1. Statistik Deskriptif

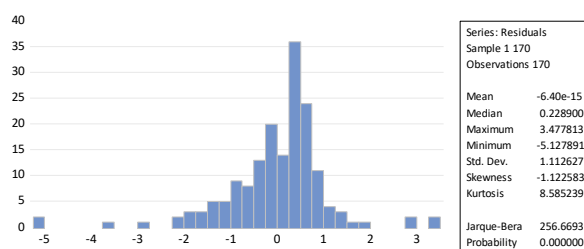
Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	DA	UP	KF
Mean	27.36506	30.27071	28.84335
Median	27.37500	30.12500	28.75000
Maximum	31.46000	34.16000	33.45000
Minimum	21.79000	28.46000	23.93000
Std. Dev.	1.317030	0.968331	1.250345
Skewness	-0.440086	1.359608	0.217554
Kurtosis	6.700981	7.026066	4.897961
Jarque-Bera	102.5097	167.1903	26.85697
Probability	0.000000	0.000000	0.000001
Sum	4652.060	5146.020	4903.370
Sum Sq. Dev.	293.1418	158.4655	264.2082
Observations	170	170	170

Sumber: *Output Views 2024*

Didasarkan tabel 2 bisa dilihat jika untuk variabel independen Ukuran Pemerintah, nilai minimumnya merupakan 28,46000, nilai maksimumnya merupakan 34,16000, nilai reratanya merupakan 30,27071, dan standar deviasinya merupakan 0,968331. Sementara itu, untuk variabel independen Kapasitas Fiskal, didapatkan nilai minimum sekitar 23,93000, nilai maksimum sekitar 33,45000, nilai reratanya merupakan 28.84335, dan standar deviasinya merupakan 1,250345. Untuk variabel dependen Diskresi Akrua, didapatkan nilai minimum sekitar 21,79000, nilai maksimum sekitar 31,46000, nilai reratanya merupakan 27,36506, dan standar deviasinya merupakan 1,317030.

2. Hasil Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: *Output Eviews 2024*

Didasarkan hasil uji memakai program Eviews versi 12, didapatkan nilai Probabilitas Jarque-Bera sekitar 256,6693, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini memberi identifikasi jika data mempunyai pendistribusian normal hingga memungkinkan dilakukannya uji t dan uji F.

3. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 07/15/24 Time: 16:14
Sample: 1 170
Included observations: 170

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	7.330362	994.7301	NA
UP	0.013989	1741.187	1.769475
KF	0.008390	948.9628	1.769475

Sumber: *Output Eviews 2024*

Dari tabel 3 dapat terlihat jika hasil uji memakai program Eviews versi 12 memberi petunjuk jika semua variabel independen punya nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10,00. Maka dari itu, didapatkan kesimpulan jika tidak ada indikasi multikolinieritas di penelitian ini.

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.758974	Prob. F(2,167)	0.1754
Obs*R-squared	3.507263	Prob. Chi-Square(2)	0.1731
Scaled explained SS	3.248658	Prob. Chi-Square(2)	0.1970

Sumber: *Output Eviews 2024*

Didasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Harvey, didapatkan nilai Probability Obs*R-squared sekitar 0,1731, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini memberi identifikasi jika uji heteroskedastisitas terpenuhi, ataupun dengan kata lain, tanpa adanya heteroskedastisitas dalam data itu. Hingga, data sudah lolos uji heteroskedastisitas.

Persamaan Regresi

Tabel 5. Hasil Persamaan Regresi

Dependent Variable: DA
Method: Panel Least Squares
Date: 07/15/24 Time: 15:19
Sample: 2018 2022
Periods included: 5
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.222929	2.707464	1.929085	0.0554
UP	0.675973	0.118274	5.715314	0.0000
KF	0.058244	0.091598	0.635866	0.5257
R-squared	0.286313	Mean dependent var		27.36506
Adjusted R-squared	0.277766	S.D. dependent var		1.317030
S.E. of regression	1.119269	Akaike info criterion		3.080718
Sum squared resid	209.2115	Schwarz criterion		3.136056
Log likelihood	-258.8611	Hannan-Quinn criter.		3.103174
F-statistic	33.49809	Durbin-Watson stat		2.262758
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: *Output Eviews 2024*

Didasarkan tabel 5 didapatkan kesimpulan jika persamaan regresi di dalam penelitian dipakai ini merupakan sebagai berikut:

$$Y = 5.222929 + 0.675973 UP + 0.058244 KF$$

Persamaan regresi ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sekitar 5.222929 menunjukkan jika variabel independen yaitu ukuran pemerintah, dan kapasitas fiskal anggaran nilainya 0 maka nilai variabel diskresi akrual sekitar 5.222929.
2. Koefisien regresi pada variabel ukuran pemerintah sekitar 0.675973 nilai yang positif memberi petunjuk adanya hubungan yang satu arah diantara variabel ukuran pemerintah pada variabel diskresi akrual Berarti ketika nilai variabel ukuran pemerintah naik sekitar 1 maka nilai terhadap diskresi akrual akan naik sekitar 0.675973 Diasumsikan variabel bebas lainnya konstan.
3. Koefisien regresi pada variabel kapasitas fiskal sekitar 0.058244 nilai yang positif memberi petunjuk adanya hubungan yang satu arah diantara variabel kapasitas fiskal pada variabel diskresi akrual, Berarti ketika nilai variabel *fiscal distress* naik sekitar 1 maka nilai terhadap diskresi akrual akan naik sekitar 0.058244. Diasumsikan variabel bebas lainnya konstan.

Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.286313	Mean dependent var	27.36506
Adjusted R-squared	0.277766	S.D. dependent var	1.317030
S.E. of regression	1.119269	Akaike info criterion	3.080718
Sum squared resid	209.2115	Schwarz criterion	3.136056
Log likelihood	-258.8611	Hannan-Quinn criter.	3.103174
F-statistic	33.49809	Durbin-Watson stat	2.262758
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output Eviews 2024*

Pada tabel 5 di atas, bisa dilihat jika nilai koefisien determinasi (R Square) merupakan sekitar 0.29. Hal ini memberi petunjuk jika 29% variabel diskresi akrual dipengaruhi oleh ukuran pemerintah dan kapasitas fiskal. Sementara sisanya 71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

Uji Hipotesis

1. Uji Statistik F

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.286313	Mean dependent var	27.36506
Adjusted R-squared	0.277766	S.D. dependent var	1.317030
S.E. of regression	1.119269	Akaike info criterion	3.080718
Sum squared resid	209.2115	Schwarz criterion	3.136056
Log likelihood	-258.8611	Hannan-Quinn criter.	3.103174
F-statistic	33.49809	Durbin-Watson stat	2.262758
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output Eviews 2024*

Didasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji-F) memakai program Eviews, didapatkan nilai f-hitung sekitar 33,49809 yang lebih besar dari F-tabel 3,05012 dengan tingkatan Probability sekitar 0,0000 yang kurang dari 0,05. Hal ini memberi identifikasi jika variabel independen didalam penelitian ini, yaitu ukuran pemerintah dan kapasitas fiskal, punya pengaruh signifikan secara simultan kepada variabel dependen diskresi akrual. Dengan demikian, didasarkan hasil itu, hipotesis penelitian menyimpulkan jika H3 menerima dan H0 menolak.

2. Uji Statistik T

Tabel 8. Hasil Uji Statistik T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.222929	2.707464	1.929085	0.0554
UP	0.675973	0.118274	5.715314	0.0000
KF	0.058244	0.091598	0.635866	0.5257

Sumber: *Output Eviews 2024*

Didasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji-t) memakai program Eviews, didapatkan nilai probabilitas (t-statistic) untuk tiap variabel independen yang merupakan indikator menerima dan menolak hipotesis. Hasil dari pengujian hipotesis pada uji parsial (uji-t) didapatkan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai t-statistik untuk variabel ukuran pemerintah (UP) sekitar t-hitung 5.715 > t-tabel 1,974, pada tingkat probabilitas $0,0000 < 0,05$, maka dapat diketahui jika H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan jika secara parsial dan signifikan variabel ukuran pemerintah berpengaruh terhadap diskresi akrual.
2. Nilai t-statistik untuk variabel kapasitas fiskal (KF) sekitar t-hitung 0.636 < t-tabel 1,974, pada tingkat probabilitas $0.5257 > 0,05$, maka dapat diketahui jika H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan jika secara parsial variabel kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap diskresi akrual.

KESIMPULAN

Didasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka simpulan yang didapatkan merupakan sebagai berikut:

- a. Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap diskresi akrual pemerintah provinsi di Indonesia yang artinya jumlah aset pemerintah daerah dapat menggambarkan seberapa besar tekanan, pengawasan, serta *spotlight* yang diberi ke pemerintah daerah itu baik dari pemerintah pusat, anggota legislatif, atau pun masyarakatnya. Hal ini mengindikasikan jika makin besar ukuran pemerintah maka makin meningkat penggunaan praktik diskresi akrual.
- b. Kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap diskresi akrual pemerintah provinsi di Indonesia, yang mana kapasitas fiskal bukan merupakan faktor utama dalam terjadinya praktik diskresi akrual.
- c. Ukuran pemerintah dan kapasitas fiskal berpengaruh secara simultan terhadap diskresi akrual pemerintah provinsi di Indonesia sekitar 29%.

SARAN

1. Bagi pemerintah provinsi agar dapat memberi peningkatan transparansi dalam sistem pelaporan keuangannya.
2. Bagi pemerintah provinsi agar dapat memperkuat fungsi audit internal untuk memastikan jika setiap pengeluaran dan pendapatan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada penyalahgunaan.
3. Bagi pemerintah provinsi agar dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi.
4. Bagi pemerintah provinsi agar membuat rencana penggunaan SiLPA yang terintegrasi dengan perencanaan anggaran jangka panjang.
5. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor lain yang masih jarang dipakai dalam upaya melihat kondisi diskresi akrual pemerintah daerah contohnya dana insentif daerah, kualitas audit serta faktor lain yang berpotensi dalam mempengaruhi diskresi akrual agar memberikan gambaran lebih menyeluruh dan akurat terkait praktik diskresi akrual, disarankan memakai data dengan rentang waktu periode yang terbaru dan juga menambah objek penelitian ataupun memperluas wilayah penelitian agar hasil yang didapatkan lebih tergeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy., & Abdul, Halim. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 17-32. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2168571>.
- Anessi-Pessina, E., & Sicilia, M. (2020). Do top managers' individual characteristics affect accounting manipulation in the public sector? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(3), 465–484
- Arcas, M. J., & Martí, C. (2016). Financial Performance Adjustment in English Local Governments. *Australian Accounting Review* 26(2), 141–152.
- Aziz, A. 2016. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. *Eksis* 11(1): 86-101. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>.
- Cohen, S., Bisogno, M.,/ & Malkogianni, I. (2019). Earnings management in local governments: the role of political factors. *Journal of Applied Accounting Research* 20(3), 331–348.
- Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators. *Academy of Management Journal*, 34, 555-590. <https://doi.org/10.5465/256406>
- Gamayuni, R., Nurdiono, N., & Prasetyo, T. (2022). A Review of Abnormal Accrual at Government: A Bibliometric Study. 1–6. <https://doi.org/10.4108/eai.7-10-2021.2316229>
- Ghozali, I. (2018). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS”* Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Handayani, Darwanis, & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi AkruaL Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 275–291. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21502>
- Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. (2023). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4(4), 460–468
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah
- Pilcher, R. (2011). Local governmental management of discretionary and specific accruals. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 7(1-2), 32– 60.

- Pina, V., Arcas, M. J., & Martí, C. (2012). Accruals and “accounting numbers management” in UK executive agencies. *Public Money and Management*, 32(4), 273–280.
- Putri, M., Abdullah, S., Adnan, A., & Yusmita, F. (2023). Manipulasi AkruaI Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Apakah Government Size Dan Kapasitas Fiskal Memiliki Efek? *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(4), 536–544.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i4.24314>
- Sari, N.M.D.P. dan I.K. Mustanda. (2019). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen* 8(8): 4759–4787.
<https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i08.p02>.
- Setiawati, L. & Na'im, A. (2000). Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15(4), 424 - 441